

# INDIKATOR EKONOMI KOTA BINJAI



2018

<https://binjaiko.sbps.go.id>



# INDIKATOR EKONOMI KOTA BINJAI



2018

# INDIKATOR EKONOMI KOTA BINJAI

## 2018

ISBN : 978-623-91552-6-1  
Katalog BPS : 9201001.1276  
Nomor Publikasi : 12760.1917  
Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm  
Jumlah Halaman : x + 42 Halaman

Naskah

Seksi Statistik Distribusi BPS Kota Binjai

Penyunting Naskah

Seksi Statistik Distribusi BPS Kota Binjai

Cover

Seksi Statistik Distribusi BPS Kota Binjai

Diterbitkan oleh

©Badan Pusat Statistik Kota Binjai

Dicetak oleh

CV. Rilis Grafika

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau mengganggakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Binjai**

# **TIM PENYUSUN**

**INDIKATOR EKONOMI KOTA BINJAI  
2018**

**Penanggung Jawab Umum  
Ir. Ida Suswati, M.Si**

**Koordinator  
Editor dan Penanggung Jawab Teknis  
Cornelia Tenar Mannita Tarigan, SE, MM**

**Ulasan  
Gambar Grafik  
Gambar Kulit  
Tata Letak  
Deby Ayuningtias, A.Md**



## KATA PENGANTAR

**Indikator Ekonomi Kota Binjai 2018** merupakan publikasi yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Kota Binjai. Publikasi ini memberikan beberapa gambaran ekonomi yang terjadi di Kota Binjai.

Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh melalui survei dan sensus yang dilaksanakan oleh BPS Kota Binjai, terdapat pula data sekunder yang dikelola oleh instansi pemerintah Kota Binjai. Data-data yang disajikan meliputi data indeks harga konsumen, pendapatan regional, dan data keuangan.

Publikasi Indikator Ekonomi Kota Binjai 2018 diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi khususnya dalam bidang perekonomian di Kota Binjai. Saran dan kritik dari berbagai pihak dalam rangka perbaikan publikasi ini di masa mendatang, sangat diharapkan. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Binjai, November 2019  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kota Binjai



Ir. IDA SUSWATI, M.Si  
NIP. 19660228 199903 2 002



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar .....	x
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Konsep dan Definisi .....	4
1.4 Sumber Data.....	9
BAB II. ULASAN SINGKAT .....	11
2.1 Indeks Harga Konsumen/Inflasi.....	13
2.2 Produk Domestik Regional Bruto .....	15
2.3 Keuangan Daerah.....	19
BAB III. LAMPIRAN .....	23



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Indeks Harga Konsumen Kota Medan Januari – Desember 2018 (2007=100) .....	25
Tabel 3.2	Persentase Perubahan Indeks Harga Konsumen Kota Medan Terhadap Bulan Sebelumnya Januari – Desember 2018 (2007=100) ..	27
Tabel 3.3	Produk Domestik Regional Bruto Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2015-2018 (Juta Rupiah) .....	29
Tabel 3.4	Produk Domestik Regional Bruto Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2015-2018 (Juta Rupiah) .....	30
Tabel 3.5	Distribusi Persentase PDRB Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2015-2018 (Persen)	31
Tabel 3.6	Distribusi Persentase PDRB Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2015-2018 (Persen) .	32
Tabel 3.7	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Binjai atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2018 (Persen) ..	33
Tabel 3.8	Indeks Harga Implisit PDRB Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha 2015-2018(Persen) .....	34
Tabel 3.9	Angka-angka Agregatif PDRB, Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kota Binjai Tahun 2015-2018.....	35
Tabel 3.10	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2018 .....	36

Tabel 3.11	Realisasi Belanja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2018 .....	40
Tabel 3.12	Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2018 .....	41
Tabel 3.13	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2018 .....	42

<https://binjaikota.bps.go.id>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Medan Periode Januari – Desember 2018.....	14
Gambar 2.2	Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Medan Tahun 2015-2018 .....	15
Gambar 2.3	Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kota Binjai Tahun 2015-2018	16
Gambar 2.4	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Binjai Tahun 2015-2018	17
Gambar 2.5	Distribusi Persentase PDRB ADHB Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018.....	17
Gambar 2.6	Perkembangan PDRB Perkapita Kota Binjai Tahun 2015-2018 .....	18
Gambar 2.7	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2018.....	20
Gambar 2.8	Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2018.....	21





X



ee



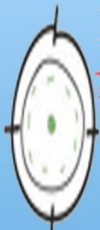
BANKING



,



+



# PENDAHULUAN 1

SAVING



INVESTMENT



## 1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional adalah upaya meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan pembangunan mencakup beberapa aspek, yaitu aspek politik, sosial budaya, ekonomi, dan aspek-aspek lainnya. Pembangunan di berbagai aspek tersebut dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing. Salah satu visi otonomi daerah dibidang ekonomi adalah otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan dipihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam hal ini, untuk mencapai visi tersebut pemerintah daerah memerlukan data dan informasi sebagai landasan dalam menyusun suatu perencanaan dan kebijakan khususnya dibidang perekonomian. Oleh karena itu, sebagai penyedia data statistik, Badan Pusat Statistik memenuhi peranan dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

Dalam mendukung peran tersebut akhirnya Badan Pusat Statistik Kota Binjai menerbitkan suatu publikasi yang berjudul *Indikator Ekonomi Kota Binjai 2018*.

## 1.2. TUJUAN

Tujuan penerbitan publikasi ini untuk menyediakan data bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah. Selain itu, publikasi ini juga bertujuan untuk menyediakan data bagi masyarakat pengguna data terutama yang berhubungan dengan kondisi perekonomian Kota Binjai.

### 1.3. KONSEP DAN DEFINISI

#### A. Indeks Harga Konsumen (IHK)

IHK adalah suatu indikator yang menggambarkan tingkat perkembangan harga konsumen. IHK diperoleh dengan cara menghimpun perubahan harga berbagai jenis barang/jasa yang tercakup dalam paket komoditas. Paket komoditas yang digunakan adalah yang menggambarkan pola konsumsi masyarakat serta menggunakan diagram timbangan nilai konsumsi hasil pemantauan pada suatu tahun dasar. IHK merupakan indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.

##### a. Inflasi

Merupakan suatu keadaan dimana harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus menerus atau terjadi penurunan nilai uang dalam negeri.

##### b. Deflasi

Merupakan suatu keadaan dimana terdapat peristiwa penurunan harga barang umum secara terus menerus atau terjadi peningkatan nilai uang.

#### B. Tahun Dasar

Merupakan periode waktu dimulainya penghitungan dimana indeksnya = 100 (2012 = 100) untuk inflasi, sedangkan PDRB indeksnya = 100 (2010=100).

#### C. Harga

Harga merupakan sejumlah uang yang dibayarkan konsumen untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Harga konsumen harga dari berbagai jenis barang dan jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat di daerah kota (urban) dengan transaksi secara eceran. Harga yang dipantau untuk penghitungan IHK adalah harga konsumen di pasar perkotaan.

D. Diagram Timbang

Merupakan nilai yang menunjukkan seberapa banyak suatu barang/jasa dikonsumsi. Nilai penimbang ini diperoleh melalui Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

E. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Dalam menghitung pendapatan regional, hanya dipakai konsep Domestik. Artinya, seluruh nilai tambah dari berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu wilayah/region (dalam hal ini Kabupaten dan Kota di Provinsi) dihitung dan dimasukkan, tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor produksi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.



Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, dan dijelaskan berikut ini:

a. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 17 Sektor yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Kategori A)
2. Pertambangan dan Penggalian (Kategori B)
3. Industri Pengolahan (Kategori C)
4. Pengadaan Listrik dan Gas (Kategori D)
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (Kategori E)
6. Konstruksi (Kategori F)
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G)
8. Transportas dan Pergudangan (Kategori H)
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Kategori I)
10. Informasi dan Komunikasi (Kategori J)
11. Jasa Keuangan dan Asuransi (Kategori K)
12. Real Estate (Kategori L)
13. Jasa Perusahaan (Kategori M dan N)
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (Kategori O)
15. Jasa Pendidikan (Kategori P)
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Kategori Q)
17. Jasa Lainnya (Kategori R, S, T, dan U)

b. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji (balas jasa tenaga kerja), sewa tanah (balas jasa tanah), bunga modal (balas jasa modal) dan keuntungan (balas jasa kewiraswastaan/*enterprenership*); semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

c. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

- (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba,
- (2) konsumsi pemerintah,
- (3) pembentukan modal tetap domestik bruto,
- (4) perubahan stok, dan
- (5) ekspor neto, (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep tiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena didalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

Dalam publikasi ini yang dihitung adalah PDRB dalam pengertian produksi yaitu jumlah nilai tambah atas produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang dikelompokkan ke dalam sektor-sektor ekonomi atau lapangan usaha, sehingga PDRB ini dikenal sebagai PDRB Menurut Lapangan Usaha.

Kegunaan PDRB:

1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya;
2. PDRB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu daerah.
3. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
4. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah.
5. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
6. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

#### F. Keuangan Daerah

Penerimaan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor utama untuk membiayai pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah berupa pajak daerah, bantuan pemerintah Provinsi dan bantuan Pemerintah Pusat. Sedangkan realisasi pengeluaran pemerintah daerah terdiri dari belanja aparatur, belanja publik serta belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

#### 1.4. SUMBER DATA

Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu data yang berasal dari survei-survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kota Binjai baik yang dilaksanakan secara bulanan maupun secara tahunan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui instansi-instansi terkait.

<https://binjajikota.bps.go.id>





X



ee



BANKING



,,



# ULASAN SINGKAT 2

SAVING

+



INVESTMENT



## 2.1 Indeks Harga Konsumen/Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (*continue*) pada periode tertentu. Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Angka inflasi merupakan persentase perubahan Indeks Harga Konsumen yang diperoleh dari Survei Harga Konsumen yang dilakukan setiap bulan.

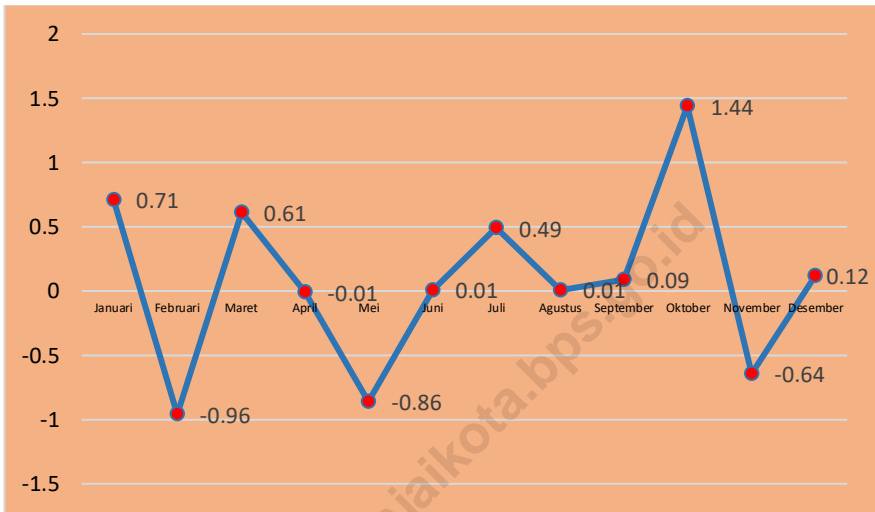
Sejak tahun 2012, penghitungan inflasi di Indonesia dilakukan terhadap 82 kota. Untuk Provinsi Sumatera Utara, penghitungan inflasi hanya dilakukan pada 4 kota yaitu, Kota Medan, Pematangsiantar, Padangsidempuan, dan Sibolga. Sementara untuk kabupaten/kota yang tidak melakukan penghitungan inflasi, dapat menggunakan angka inflasi dari Kota yang melakukan penghitungan inflasi. Penentuan berdasarkan kemiripan pola konsumsi masyarakat dan kedekatan wilayah geografisnya. Untuk Kota Binjai, angka inflasi yang dijadikan acuan adalah angka inflasi Kota Medan yang dianggap memiliki kemiripan dalam pola konsumsi masyarakatnya serta kedekatan wilayah geografisnya.

Gambaran umum inflasi yang terjadi di Kota Medan selama bulan Januari sampai dengan Desember 2018 dapat dilihat pada gambar 2.1. Secara umum, tingkat inflasi di Kota Medan cukup berfluktuatif. Selama tahun 2018 terjadi deflasi sebanyak 4 kali di Kota Medan yaitu pada bulan Februari, April, Mei, dan November. Sedangkan pada bulan-bulan lain terjadi inflasi.

Inflasi tertinggi selama tahun 2018 terjadi pada bulan Oktober, yakni sebesar 1,44 persen dengan indeks harga konsumen sebesar 139,26. Hal ini disebabkan naiknya harga kelompok bahan makanan, antara lain kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, dan kelompok bahan makanan lainnya. Sementara deflasi terendah terjadi pada bulan Februari yaitu mengalami deflasi 0,96 persen dengan indeks harga konsumen sebesar 136,82. Hal ini juga disebabkan karena penurunan harga kelompok bahan makanan.

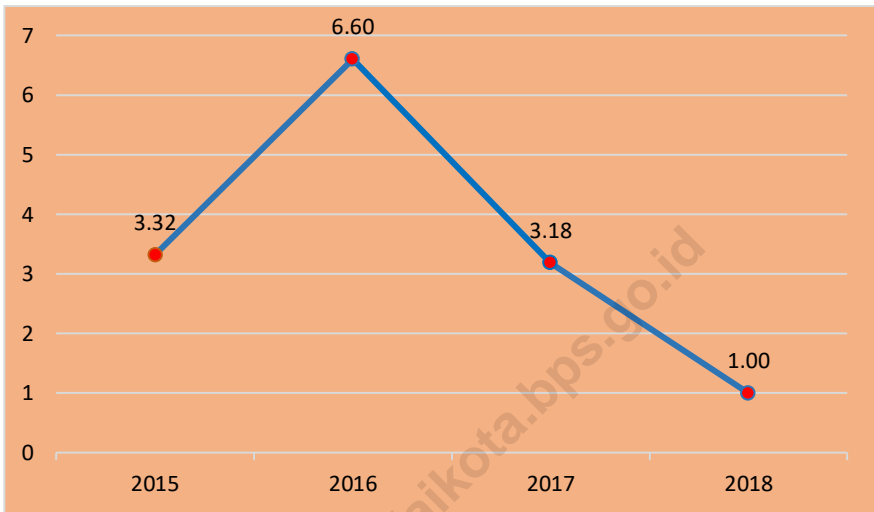


Gambar 2.1 Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Medan Periode  
Januari – Desember 2018 (Persen)



Perkembangan inflasi kota Medan selama tahun 2015-2018 dapat dilihat pada gambar 2.2. Jika dilihat secara tahunan (tahun kalender), pada tahun 2018 di Kota Medan terjadi sebesar 1,00 persen yang merupakan tingkat inflasi terendah sepanjang tahun 2015-2018. Sementara tingkat inflasi tertinggi pada periode tersebut terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 6,60 persen.

Gambar 2.2 Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Medan Tahun 2015-2018

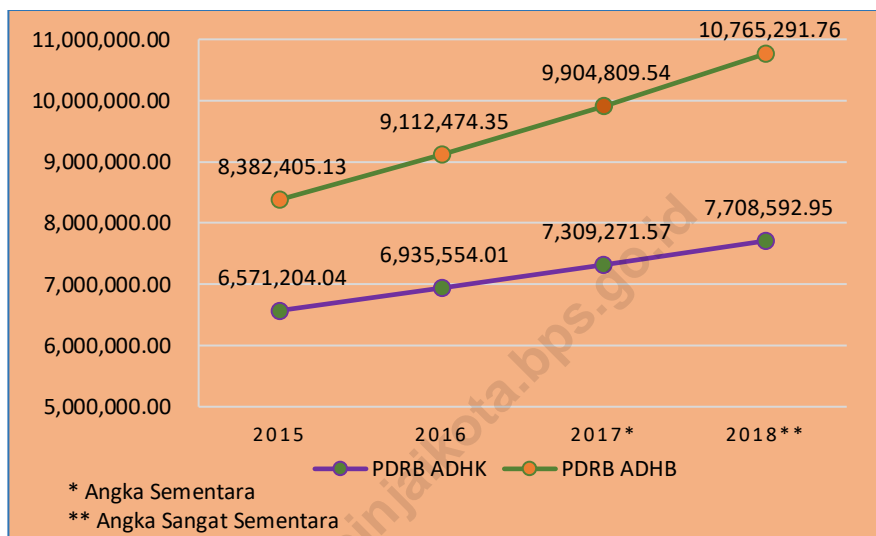


## 2.2 Produk Domestik Regional Bruto

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB merupakan salah satu indikator untuk melihat sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan. Angka PDRB disajikan dalam dua bentuk yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010. Perkembangan PDRB Kota Binjai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada gambar 2.3.

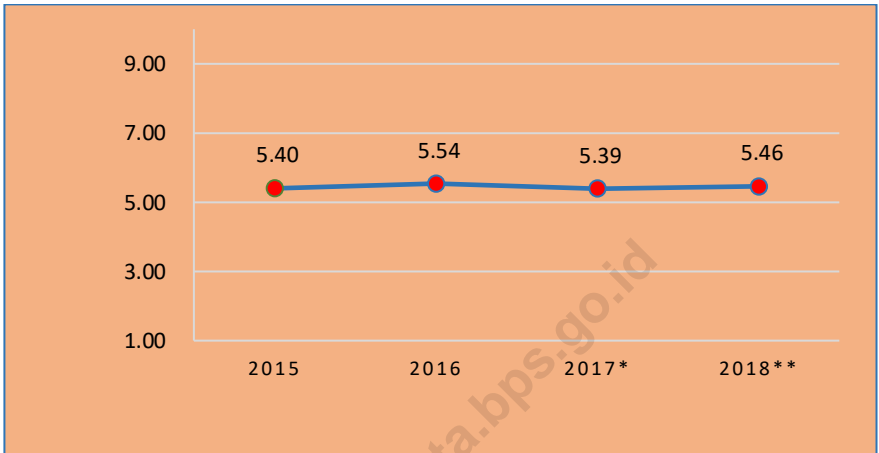
Gambar 2.3 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kota Binjai Tahun 2015-2018

(Juta Rupiah)



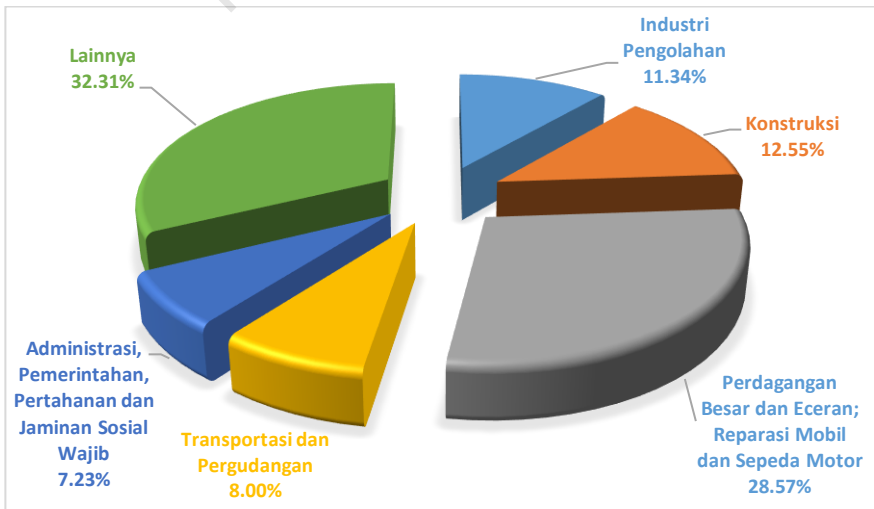
Dari gambar di atas terlihat bahwa perkembangan PDRB Kota Binjai terus meningkat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Berdasarkan harga konstan, pada tahun 2018, PDRB Kota Binjai mengalami peningkatan sebesar 5,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini juga berarti besarnya pertumbuhan ekonomi di Kota Binjai tahun 2018 adalah sebesar 5,46 persen. Meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif, namun besarnya pertumbuhan ekonomi Kota Binjai sebenarnya mengalami fluktuasi jika dibandingkan dari tahun 2015, 2016, dan 2017 yang masing-masing memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5,40; 5,54; dan 5,39 persen.

Gambar 2.4 Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Binjai Tahun 2015-2018



Distribusi persentase PDRB ADHB Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha dapat menjelaskan terkait struktur ekonomi yang ada di Kota Binjai. Distribusi persentase PDRB ADHB Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada Gambar 2.5.

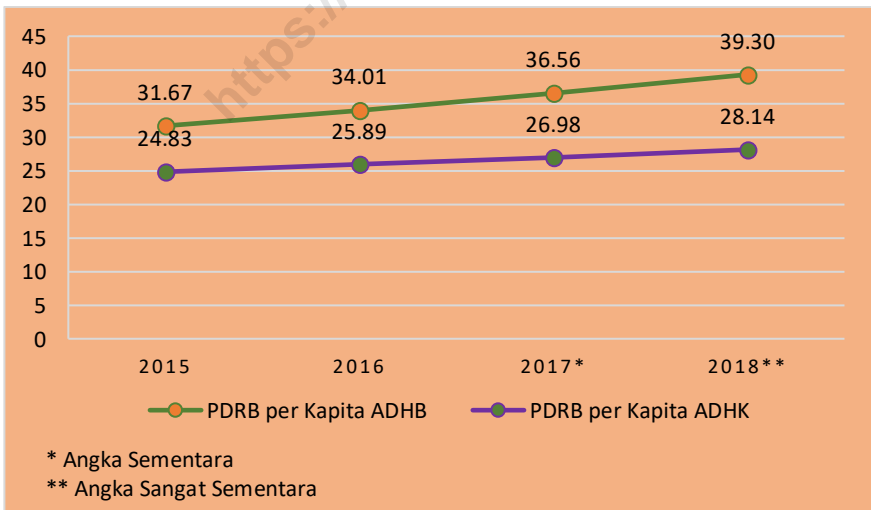
Gambar 2.5 Distribusi Persentase PDRB ADHB Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memberi kontribusi terbesar dalam menyumbang PDRB di Kota Binjai, sehingga dapat dikatakan bahwa struktur ekonomi Kota Binjai didominasi oleh perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 28,57 persen.

Selain melihat pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi suatu wilayah, PDRB juga dapat melihat gambaran pendapatan yang diperoleh oleh penduduk suatu wilayah. Pendapatan yang diperoleh penduduk Kota Binjai dapat dilihat dari PDRB perkapita Kota Binjai. PDRB perkapita ADHB Kota Binjai pada tahun 2018 adalah sebesar 39,30 juta rupiah sedangkan PDRB perkapita ADHK sebesar 28,14 juta rupiah. Perkembangan pendapatan penduduk Kota Binjai secara lengkap dapat dilihat pada gambar 2.6 dibawah ini.

Gambar 2.6 Perkembangan PDRB Perkapita Kota Binjai Tahun 2015-2018 (Juta Rupiah)



Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita yang relatif tinggi belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan rakyat, karena hal ini sangat tergantung pada pertumbuhan penduduk pertengahan tahun. Untuk itu, selain meningkatkan pendapatan per kapita, pertumbuhan penduduk juga merupakan satu hal yang penting untuk menjadi perhatian pemerintah daerah jika ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat.

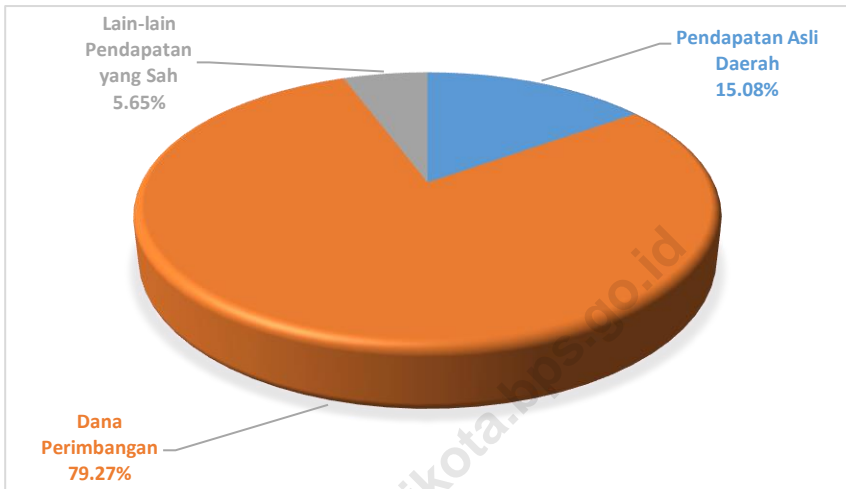
### 2.3 Keuangan Daerah

Bagian ini menyajikan data yang mencakup pengelolaan keuangan daerah Kota Binjai. Pada bagian ini dapat dilihat Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Binjai pada tahun 2018.

Pada Tahun 2018, total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai sebesar 135,87 milyar rupiah, pendapatan terbesar berasal dari hasil pajak daerah, yaitu sebesar 47,51 milyar rupiah atau sekitar 35 persen dari total PAD Kota Binjai (Tabel 3.10 Lampiran).

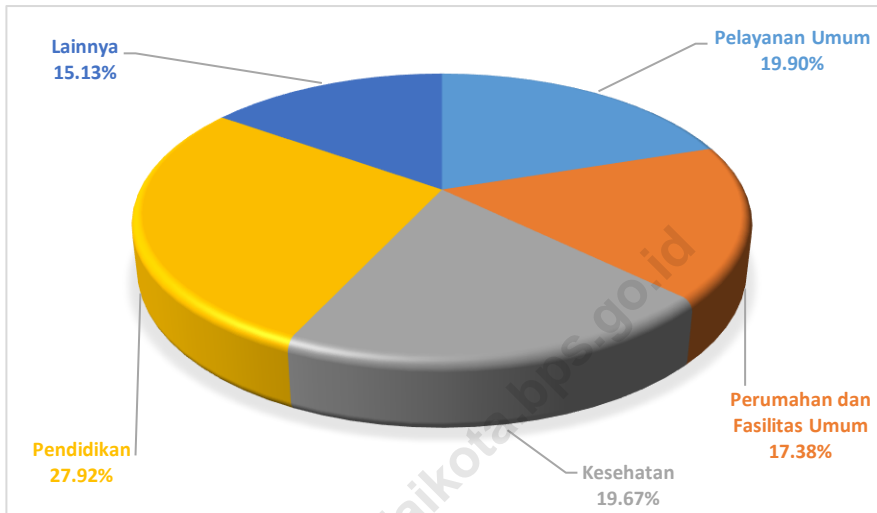
Realisasi belanja daerah Kota Binjai pada tahun 2018 adalah sebesar 934,60 milyar rupiah yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 430,17 milyar rupiah atau sekitar 46,03 persen dari total belanja dan belanja langsung sebesar 504,44 milyar rupiah atau sekitar 53,97 persen dari total belanja. Dari rincian tersebut dapat dilihat bahwa realisasi belanja terbesar adalah realisasi belanja langsung. Jika dilihat secara keseluruhan, belanja pegawai yang merupakan bagian dari belanja tidak langsung memberikan realisasi belanja terbesar yaitu sebesar 419,44 milyar rupiah atau sekitar 97,51 persen dari total realisasi belanja pemerintah Kota Binjai (Tabel 3.11 Lampiran)

Gambar 2.7 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2018



Gambar 2.7 menunjukkan sumber terbesar pendapatan daerah Kota Binjai tahun 2018 yang memiliki nilai sebesar 901,17 milyar rupiah adalah dari dana perimbangan yaitu sebesar 714,37 milyar rupiah atau sebesar 79,27 persen dari total pendapatan daerah Kota Binjai. Sementara pendapatan yang bersumber dari PAD sebesar 15,08 persen dan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 5,65 persen dari total pendapatan daerah Kota Binjai.

Gambar 2.8 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2018



Jika dilihat menurut fungsinya, realisasi belanja pemerintah daerah Kota Binjai terkonsentrasi pada pendidikan yaitu sebesar 27,92 persen dari total realisasi belanja. Pada fungsi-fungsi lain seperti pelayanan umum, perumahan dan fasilitas umum, dan kesehatan masing-masing sebesar 19,90 persen, 17,38 persen, dan 19,67 persen. Sedangkan sisanya sebesar 15,13 persen digunakan untuk fungsi lainnya.





BANKING

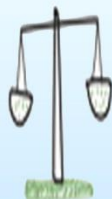
SAVING

LAMPIRAN 3

INVESTMENT



X



ee



,,

+



-



Tabel 3.1 Indeks Harga Konsumen Kota Medan Januari – Desember 2018 (2007=100)

Kelompok dan sub kelompok	Bulan					
	Jan.	Feb.	Maret	April	Mei	Juni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bahan Makanan	156,33	150,00	152,84	151,39	145,84	142,86
Makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau	140,47	141,26	141,21	141,83	141,87	142,56
Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	132,80	132,94	133,10	133,41	133,93	134,25
Sandang	116,32	117,05	117,72	116,54	116,89	117,67
Kesehatan	123,70	123,77	124,83	125,72	125,71	125,85
Pendidikan, rekreasi, dan olahraga	133,77	133,78	133,77	133,73	133,75	133,75
Transport, komunikasi, dan jasa keuangan	133,41	133,02	133,41	134,37	133,90	136,17
<b>Umum</b>	<b>138,14</b>	<b>136,82</b>	<b>137,66</b>	<b>137,65</b>	<b>136,46</b>	<b>136,47</b>

Tabel 3.1 Lanjutan

Kelompok dan sub kelompok	Bulan					
	Juli	Agust.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bahan Makanan	145,62	145,91	145,57	151,68	146,68	146,31
Makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau	142,72	143,13	144,24	145,00	145,08	145,14
Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	134,33	134,74	134,85	135,81	136,08	136,29
Sandang	117,91	116,38	116,28	118,67	118,39	117,83
Kesehatan	125,93	125,87	125,92	126,03	125,91	125,83
Pendidikan, rekreasi, dan olahraga	134,90	134,92	134,98	135,20	135,25	135,25
Transpor, komunikasi, dan jasa keuangan	135,66	135,06	135,09	135,43	136,35	137,52
<b>Umum</b>	<b>137,14</b>	<b>137,15</b>	<b>137,28</b>	<b>139,26</b>	<b>138,37</b>	<b>138,53</b>

Tabel 3.2 Persentase Perubahan Indeks Harga Konsumen Kota Medan Terhadap Bulan Sebelumnya Januari – Desember 2018 (2007=100)

Kelompok dan sub kelompok	Bulan					
	Jan.	Feb.	Maret	April	Mei	Juni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bahan Makanan	1,89	-4,05	1,89	-0,95	-3,67	-2,04
Makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau	0,31	0,56	-0,04	0,44	0,03	0,49
Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	0,02	0,11	0,12	0,23	0,39	0,24
Sandang	-0,09	0,63	0,57	-1,00	0,30	0,67
Kesehatan	1,45	0,06	0,86	0,71	-0,01	0,11
Pendidikan, rekreasi, dan olahraga	0,17	0,01	-0,01	-0,03	0,01	0,00
Transpor, komunikasi, dan jasa keuangan	0,60	-0,29	0,29	0,72	-0,35	1,70
<b>Umum</b>	<b>0,71</b>	<b>-0,96</b>	<b>0,61</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,86</b>	<b>0,01</b>

Tabel 3.2 Lanjutan

Kelompok dan sub kelompok	Bulan					
	Juli	Agust.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bahan Makanan	1,93	0,20	-0,23	4,20	-3,30	-0,25
Makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau	0,11	0,29	0,78	0,53	0,06	0,04
Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	0,06	0,31	0,08	0,71	0,20	0,15
Sandang	0,20	-1,30	-0,09	2,06	-0,24	-0,47
Kesehatan	0,06	-0,05	0,04	0,09	-0,10	-0,06
Pendidikan, rekreasi, dan olahraga	0,86	0,01	0,04	0,16	0,04	0,00
Transpor, komunikasi, dan jasa keuangan	-0,37	-0,44	0,02	0,25	0,68	0,86
<b>Umum</b>	<b>0,49</b>	<b>0,01</b>	<b>0,09</b>	<b>1,44</b>	<b>-0,64</b>	<b>0,12</b>

Tabel 3.3 Produk Domestik Regional Bruto Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2015-2018 (Juta Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016 <sup>1)</sup>	2017 <sup>x)</sup>	2018 <sup>xx)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	305.114,17	314.476,92	321.047,58	334.271,55
B	Pertambangan dan Penggalian	268.715,81	303.582,75	308.118,46	319.368,71
C	Industri Pengolahan	981.624,32	1.031.996,39	1.134.213,00	1.220.520,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.384,05	9.758,30	11.112,40	12.193,64
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.372,65	11.425,46	12.673,84	13.073,03
F	Konstruksi	1.046.060,49	1.123.251,41	1.223.628,74	1.350.941,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.195.986,43	2.447.703,19	2.744.702,34	3.075.400,36
H	Transportasi dan Pergudangan	676.896,49	746.038,54	810.483,95	861.267,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	480.904,24	512.678,82	549.104,37	589.082,55
J	Informasi dan Komunikasi	187.842,66	212.404,33	235.826,70	256.634,93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	323.890,10	345.088,39	359.934,69	374.375,50
L	Real Estate	622.426,43	676.953,79	740.217,81	822.248,71
M,N	Jasa Perusahaan	73.384,28	79.962,74	87.372,83	91.814,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	652.682,49	710.241,73	746.731,69	778.240,07
P	Jasa Pendidikan	411.231,61	435.680,37	458.273,87	492.725,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	87.387,47	98.487,67	105.392,58	114.430,22
R,S,T,U	Jasa lainnya	48.501,42	52.743,53	55.974,67	58.703,53
<b>PDRB</b>		<b>8.382.405,13</b>	<b>9.112.474,35</b>	<b>9.904.809,54</b>	<b>10.765.291,76</b>

<sup>1)</sup> Angka Perbaikan

<sup>x)</sup> Angka Sementara

<sup>xx)</sup> Angka Sangat Sementara



Tabel 3.4 Produk Domestik Regional Bruto Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2015-2018 (Juta Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016 <sup>r</sup>	2017 <sup>*</sup>	2018 <sup>xx</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	244.282,62	245.525,82	247.661,50	250.282,90
B	Pertambangan dan Penggalian	204.361,29	216.941,29	224.742,70	232.273,59
C	Industri Pengolahan	746.666,01	775.333,94	805.206,77	840.747,61
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.652,46	11.504,82	12.276,23	12.874,61
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.112,27	8.516,45	8.984,58	9.224,48
F	Konstruksi	767.325,48	813.785,36	862.125,07	913.336,22
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.874.060,94	2.010.079,05	2.157.127,67	2.303.595,68
H	Transportasi dan Pergudangan	528.508,82	568.618,41	611.944,97	644.587,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	401.716,49	415.613,33	433.108,04	459.490,62
J	Informasi dan Komunikasi	187.680,29	204.978,74	219.706,19	235.753,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	240.329,92	246.584,81	248.639,58	252.289,02
L	Real Estate	450.040,37	479.251,19	505.328,72	540.602,39
M,N	Jasa Perusahaan	52.082,74	54.471,83	56.983,42	59.023,73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	438.708,15	448.458,08	458.682,65	476.109,81
P	Jasa Pendidikan	315.017,26	329.832,72	345.741,94	362.418,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	65.560,45	68.675,33	72.538,79	76.122,66
R,S,T,U	Jasa lainnya	36.098,47	37.382,84	38.772,75	39.860,21
<b>PDRB</b>		<b>6 571 204,04</b>	<b>6 935 554,01</b>	<b>7 309 571,57</b>	<b>7.708.592,95</b>

<sup>r</sup>) Angka Perbaikan

<sup>\*</sup>) Angka Sementara

<sup>xx</sup>) Angka Sangat Sementara

Tabel 3.5 Distribusi Persentase PDRB Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2015-2018 (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016 <sup>1)</sup>	2017 <sup>x)</sup>	2018 <sup>xx)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,64	3,45	3,24	3,11
B	Pertambangan dan Penggalian	3,21	3,33	3,11	2,97
C	Industri Pengolahan	11,71	11,33	11,45	11,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,13	0,13	0,12
F	Konstruksi	12,48	12,33	12,35	12,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	26,20	26,86	27,71	28,57
H	Transportasi dan Pergudangan	8,08	8,19	8,18	8,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,74	5,63	5,54	5,47
J	Informasi dan Komunikasi	2,24	2,33	2,38	2,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,86	3,79	3,63	3,48
L	Real Estate	7,43	7,43	7,47	7,64
M,N	Jasa Perusahaan	0,88	0,88	0,88	0,85
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,79	7,79	7,54	7,23
P	Jasa Pendidikan	4,91	4,78	4,63	4,58
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,04	1,08	1,06	1,06
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,58	0,58	0,57	0,55
<b>PDRB</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Angka Perbaikan

<sup>x)</sup> Angka Sementara

<sup>xx)</sup> Angka Sangat Sementara

Tabel 3.6 Distribusi Persentase PDRB Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2015-2018 (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016 <sup>r</sup>	2017 <sup>*</sup>	2018 <sup>**</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,72	3,54	3,39	3,25
B	Pertambangan dan Penggalian	3,11	3,13	3,07	3,01
C	Industri Pengolahan	11,36	11,18	11,02	10,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,17	0,17	0,17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12	0,12
F	Konstruksi	11,68	11,73	11,79	11,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,52	28,98	29,51	29,88
H	Transportasi dan Pergudangan	8,04	8,20	8,37	8,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,11	5,99	5,93	5,96
J	Informasi dan Komunikasi	2,86	2,96	3,01	3,06
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,66	3,56	3,40	3,27
L	Real Estate	6,85	6,91	6,91	7,01
M,N	Jasa Perusahaan	0,79	0,79	0,78	0,77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,68	6,47	6,28	6,18
P	Jasa Pendidikan	4,79	4,76	4,73	4,70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,00	0,99	0,99	0,99
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,55	0,54	0,53	0,52
<b>PDRB</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

<sup>r</sup>) Angka Perbaikan

<sup>\*</sup>) Angka Sementara

<sup>\*\*</sup>) Angka Sangat Sementara

Tabel 3.7 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Binjai atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2018 (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016 <sup>1)</sup>	2017 <sup>x)</sup>	2018 <sup>xx)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,11	0,51	0,87	1,06
B	Pertambangan dan Penggalian	3,48	6,16	3,60	3,35
C	Industri Pengolahan	3,75	3,84	3,85	4,41
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,07	8,00	6,71	4,87
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,18	4,98	5,50	2,67
F	Konstruksi	5,43	6,05	5,94	5,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,31	7,26	7,32	6,79
H	Transportasi dan Pergudangan	7,57	7,59	7,62	5,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,56	3,46	4,21	6,09
J	Informasi dan Komunikasi	12,26	9,22	7,18	7,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,53	2,60	0,83	1,47
L	Real Estate	6,78	6,49	5,44	6,98
M,N	Jasa Perusahaan	4,67	4,59	4,61	3,58
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,04	2,22	2,28	3,80
P	Jasa Pendidikan	4,62	4,70	4,82	4,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,88	4,75	5,63	4,94
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,24	3,56	3,72	2,80
<b>PDRB</b>		<b>5,40</b>	<b>5,54</b>	<b>5,39</b>	<b>5,46</b>

<sup>1)</sup> Angka Perbaikan

<sup>x)</sup> Angka Sementara

<sup>xx)</sup> Angka Sangat Sementara

Tabel 3.8 Indeks Harga Implisit PDRB Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha 2015-2018 (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016 <sup>f</sup>	2017 <sup>x</sup>	2018 <sup>xx</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	124,90	128,08	129,63	133,56
B	Pertambangan dan Penggalian	131,49	139,94	137,10	137,50
C	Industri Pengolahan	131,47	133,10	140,86	145,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	88,09	84,82	90,52	94,71
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	127,86	134,16	141,06	141,72
F	Konstruksi	136,33	138,03	141,93	147,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	117,18	121,77	127,24	133,50
H	Transportasi dan Pergudangan	128,08	131,20	132,44	133,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	119,71	123,35	126,78	128,20
J	Informasi dan Komunikasi	100,09	103,62	107,34	108,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	134,77	139,95	144,76	148,39
L	Real Estate	138,30	141,25	146,48	152,10
M,N	Jasa Perusahaan	140,90	146,80	153,33	155,55
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	148,77	158,37	162,80	163,46
P	Jasa Pendidikan	130,54	132,09	132,55	135,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	133,29	143,41	145,29	150,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	134,36	141,09	144,37	147,27
<b>PDRB</b>		<b>127,56</b>	<b>131,39</b>	<b>135,50</b>	<b>139,65</b>

<sup>f</sup>) Angka Perbaikan

<sup>x</sup>) Angka Sementara

<sup>xx</sup>) Angka Sangat Sementara

Tabel 3.9 Angka-angka Agregatif PDRB, Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kota Binjai Tahun 2015-2018

URAIAN	Tahun			
	2015	2016	2017 <sup>x</sup>	2018 <sup>xx</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	8.382.405,13	9.112.474,35	9.904.809,54	10.765.291,76
2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	6.571.204,04	6.935.554,01	7.309.271,57	7.708.592,95
3. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	264.687	267.901	270.926	273.892
4. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	31,67	34,01	36,56	39,30
5. PPDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	24,83	25,89	26,98	28,14

<sup>x</sup>) Angka Sementara

<sup>xx</sup>) Angka Sangat Sementara

Tabel 3.10 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2018

Jenis Pendapatan		Jumlah (Rupiah)
(1)		(2)
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>135.870.920.432,89</b>
<b>1.1</b>	<b>Hasil Pajak Daerah</b>	<b>47.509.224.315,62</b>
1.	Pajak Hotel	226.490.000,00
2.	Pajak Restoran	5.991.916.182,00
3.	Pajak Hiburan	1.489.912.428,00
4.	Pajak Reklame	1.840.354.569,47
5.	Pajak Penerangan Jalan	21.633.447.378,60
6.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	-
7.	Pajak Parkir	1.379.892.623,00
8.	Pajak Air Tanah	168.491.625,80
9.	Pajak Sarang Burung Walet	22.324.000,00
10.	Pajak Lingkungan	-
11.	Pajak Bumi dan Bangunan	7.235.757.646,00
12.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	7.520.637.862,75
13.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-
<b>1.2</b>	<b>Hasil Restribusi Daerah</b>	<b>4.444.012.420,00</b>
1.2.1	Restribusi Jasa Umum	2.857.113.860,00
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	202.671.500,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	772.185.000,00
3.	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	-
4.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	-
5.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	831.072.000,00
6.	Retribusi Pelayanan Pasar	714.810.360,00
7.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	231.090.000,00
8.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	32.000.000,00
9.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	-
10.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	-
11.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-
12.	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	-
13.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-
14.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	7.120.000,00
15.	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pembantu	66.165.000,00

Tabel 3.10 Lanjutan

Jenis Pendapatan		Jumlah (Rupiah)
(1)		(2)
1.2.2	Restribusi Jasa Usaha	617.605.860,00
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.235.000,00
2.	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	-
3.	Retribusi Tempat Pelelangan	-
4.	Retribusi Terminal	140.880.000,00
5.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	-
6.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggraha/Villa	-
7.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-
8.	Retribusi Rumah Potong Hewan	270.147.000,00
9.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	-
10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	53.550.000,00
11.	Retribusi Penyeberangan di Air	-
12.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	-
13.	Retribusi Lainnya	151.793.860,00
1.2.3	Restribusi Perizinan Tertentu	969.292.700
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	967.612.700,00
2.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	-
3.	Retribusi Izin Gangguan/Keamanan	-
4.	Retribusi Izin Trayek	1.680.000,00
5.	Retribusi Izin Usaha Perikanan	-
<b>1.3</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>5.687.816.160,00</b>
1.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.867.816.160,00
2.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	-
3.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	-



Table 3.10 Lanjutan

Jenis Pendapatan		Jumlah (Rupiah)
(1)		(2)
<b>1.4</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>78.229.867.537,27</b>
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	526.213.362,00
2.	Penerimaan Jasa Giro	2.100.910.120
3.	Pendapatan Bunga Deposito	-
4.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	359.719.600,00
5.	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	-
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	151.241.300,00
7.	Pendapatan Denda Pajak	470.402.859,00
8.	Pendapatan Denda Kapitasi JKN-LRA	-
9.	Pendapatan Dana Bos-LRA	-
10.	Pendapatan dari Pengembalian	1.585.341.997,27
11.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	3.365.935.000,00
12.	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-
13.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	-
14.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-
15.	Pendapatan BLUD dan JKN	40.600.901.155,00
16.	Lainnya ; Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	29.069.202.144,00
<b>2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>714.374.160.938,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b>20.060.442.599,00</b>
2.1.1	Bagi Hasil Pajak	16.365.562.634,00
1.	Pajak Bumi dan Bangunan	6.915.383.298,00
2.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Neqeri dan PPh Pasal 21	8.907.286.509,00
3.	Bagi Hasil Cukai Tembakau	134.291.500,00
4.	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan	408.601.327,00
2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3.694.879.965,00
1.	Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)	-
2.	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	186.366.228,00
3.	Dana Reboisasi	-
4.	Iuran Tetap (Land-rent)	-
5.	Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	-
6.	Pungutan Pengusahaan Perikanan	-
7.	Pungutan Hasil Perikanan	701.234.591,00

Tabel 3.10 Lanjutan

Jenis Pendapatan		Jumlah (Rupiah)
(1)		(2)
8.	Pertambangan Minyak Bumi	68.543.836,00
9.	Pertambangan Gas Bumi	-
10.	Pertambangan Panas Bumi	17.427.394,00
11.	SDA Mineral dan Batubara	2.721.307.916,00
<b>2.2</b>	<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>564.377.582.000,00</b>
<b>2.3</b>	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>	<b>129.936.136.339,00</b>
2.3.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	50.030.437,77
2.3.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	79.905.698.561,00
<b>3.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>50.923.774.088,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	-
3.1.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	-
<b>3.2</b>	<b>Dana Darurat</b>	-
<b>3.3</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>32.800.287.680,00</b>
3.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	32.800.287.680,00
1.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	6.938.307.307,00
2.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	200.540.432,00
3.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.353.125.798,00
4.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	24.490.999,00
5.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	16.283.823.144,00
6.	Bagi Hasil Retribusi Tera Ulang Metrologi	-
<b>3.4</b>	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	-
3.4.1	Dana Penyesuaian	-
3.4.2	Dana Otonomi Khusus	-
<b>3.5</b>	<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya</b>	-
3.5.1	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-
<b>3.6</b>	<b>Dana Desa</b>	-
<b>3.7</b>	<b>Lainnya</b>	<b>18.123.486.408,00</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Tabel 3.11 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2018

Jenis Belanja	Jumlah (Rupiah)
(1)	(2)
<b>1. Belanja Tidak Langsung</b>	<b>430.165.572.251,00</b>
1.1. Belanja Pegawai	419.437.711.314,00
1.2. Belanja Bunga	-
1.3. Belanja Subsidi	263.734.200,00
1.4. Belanja Hibah	8.384.667.841,00
1.5. Belanja Bantuan Sosial	735.000.000,00
1.6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	588.720.825,00
1.8. Belanja Tidak Terduga	755.738.071,00
<b>2. Belanja Langsung</b>	<b>504.437.926.278,72</b>
2.1. Belanja Pegawai	49.702.081.220,00
2.2. Belanja Barang dan Jasa	240.481.617.945,74
2.3. Belanja Modal	214.254.227.112,98

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Tabel 3.12 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2018

Jenis Belanja	Jumlah (Rupiah)
(1)	(2)
<b>Belanja Menurut Fungsi</b>	<b>934.603.498.529,72</b>
1. Pelayanan Umum	185.971.153.240,00
2. Ketertiban dan Keamanan	29.253.433.545,00
3. Ekonomi	64.510.114.880,00
4. Lingkungan Hidup	25.809.936.553,00
5. Perumahan dan Fasilitas Umum	162.415.368.330,00
6. Kesehatan	183.856.211.424,91
7. Pariwisata dan Budaya	6.836.737.812,00
8. Pendidikan	260.959.711.337,81
9. Perlindungan Sosial	14.990.831.407,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Tabel 3.13 Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2018

Jenis Pembiayaan	Jumlah (Rupiah)
(1)	(2)
<b>Pembiayaan</b>	<b>39.622.635.362,41</b>
<b>1. Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>45.604.977.421,41</b>
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.604.977.421,41
1.2 Pencairan Dana Cadangan	-
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	-
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	-
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-
1.8 Koreksi SILPA	-
<b>2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>5.982.342.059,00</b>
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	-
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.982.342.059,00
2.3 Pembayaran Pokok Utang	-
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	-
<b>3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>6.187.992.291,58</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai



Sensus  
Penduduk  
2020

# D A T A

## MENCERDASKAN BANGSA

<https://binjaikota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA BINJAI**

Jl. WR. Mongonsidi No. 22 Binjai 20714  
Telp : (061) 8826571, Fax (061) 8821146

Homepage : <http://www.binjaikota.bps.go.id>, Email : [bps1276@bps.go.id](mailto:bps1276@bps.go.id)

ISBN 978-623-93552-6-3



9 786239

155261